

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Figur publik merupakan sosok yang dikenal secara luas oleh masyarakat umum. Segala tindakan yang mereka lakukan akan menjadi perhatian bagi mata publik dan juga memberikan pengaruh kepada masyarakat. Dua elemen utama yang melekat pada figur publik adalah popularitas dan hubungannya dengan kepentingan masyarakat (Huang, 2015). Oleh karena itu, figur publik diharapkan mampu menjadi teladan atau panutan bagi masyarakat. Salah satu tokoh yang menjadi figur publik adalah anggota DPR yang dikenal juga sebagai wakil rakyat pada bidang pemerintahan.

Peran internet dan media sosial yang semakin mendominasi dalam dunia teknologi dan informasi membuat interaksi di antara para anggota DPR tersebut dan masyarakat menjadi terasa lebih dekat. Segala hal yang mereka lakukan dapat dibagikan dengan mudah melalui unggahan media sosial sehingga hal ini dapat menarik minat masyarakat untuk ikut memantau kinerja mereka di dalam pemerintahan. Fenomena ini menjadi perbedaan terbesar dari figur publik di era perkembangan media sosial dan era tradisional, di mana para pengguna media sosial dapat berperan sebagai konten dan audiensi dalam satu waktu (Hearn & Schoenhoff, 2016). Fenomena ini juga membuat para anggota DPR yang sebelumnya hanya dikenal melalui situs resmi pemerintahan atau televisi, mulai membentuk persona dalam media sosial.

Meskipun demikian, berbagai permasalahan yang melibatkan anggota DPR kerap mewarnai pemberitaan sehari-hari di berbagai media. Permasalahan yang

muncul dalam pemberitaan terkait anggota DPR cukup beragam, mulai dari masalah ucapan mereka yang terkesan tidak pantas ditujukan kepada rakyat sampai kasus hukum yang lebih serius seperti korupsi. Akibatnya, masyarakat merasakan kekecewaan yang besar dan kehilangan rasa percaya terhadap anggota DPR tersebut. Seperti apa yang terjadi pada rentang waktu Agustus hingga September 2025, gelombang demonstrasi besar yang dipicu oleh kenaikan tunjangan anggota DPR serta sejumlah pernyataan dan sikap anggota dewan yang tidak berempati terhadap kondisi masyarakat membuahkan hasil krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Krisis kepercayaan tersebut berujung pada aksi demonstrasi yang dilakukan bukan hanya oleh mahasiswa, tetapi diikuti berbagai lapisan masyarakat, serta penjarahan rumah pribadi sejumlah anggota dewan yang menunjukkan betapa besar tekanan emosional dan sosial yang harus dihadapi oleh para politisi yang menjadi sorotan. Sejumlah anggota DPR, di antaranya adalah Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Uya Kuya dinonaktifkan dari keanggotaan fraksi masing-masing partai politik. Anggota dewan yang menjadi sorotan tersebut berusaha mengembalikan nama baik mereka dan kepercayaan masyarakat dengan memberikan klarifikasi terkait masalah yang mereka hadapi melalui berbagai media, salah satunya adalah melalui unggahan di media sosial. Pernyataan klarifikasi ini dilanjutkan dengan permintaan maaf yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dirugikan dan masyarakat luas.

Permintaan maaf merupakan salah satu jenis dari tindak tutur ekspresif yang telah dikemukakan oleh Searle, yaitu tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam

ujaran tersebut seperti memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, mengeluh, dan meminta maaf. Video klarifikasi dan permintaan maaf para anggota DPR RI dapat dipandang sebagai realisasi dari tindak tutur ekspresif meminta maaf yang diwujudkan dalam bentuk tuturan lisan dan disebarluaskan melalui media sosial.

Permintaan maaf memiliki beberapa strategi, seperti yang telah diklasifikasikan oleh Andrew Cohen dan Elite Olshtain (1985), strategi ini dibagi ke dalam lima kategori utama. Kategori strategi permintaan maaf tersebut tidak selalu muncul secara bersamaan dalam satu tuturan permintaan maaf, melainkan dapat dipilih dan dikombinasikan secara selektif oleh penutur sesuai dengan pertimbangan kesalahan dan apa tujuan yang ingin dicapai dari permintaan maaf tersebut. Dalam konteks video klarifikasi dan permintaan maaf anggota DPR RI, pemilihan strategi permintaan maaf menjadi suatu hal yang menarik untuk dikaji secara linguistik. Setiap anggota dewan yang dinonaktifkan melakukan kesalahan yang berbeda dan tekanan publik yang berbeda sehingga berpotensi menghasilkan pola strategi kebahasaan yang beragam pula.

Permintaan maaf anggota DPR RI dalam penelitian ini bukan tuturan sehari-hari biasa, melainkan tuturan yang disampaikan oleh figur dengan kekuatan sosial tinggi namun berada dalam posisi terdesak akibat sanksi kelembagaan. Kombinasi kedua faktor yang biasanya berlawanan ini jarang ditemukan pada objek kajian pragmatik yang selama ini didominasi figur hiburan atau individu biasa, di dalam permintaan maaf oleh anggota DPR RI terdapat kata “saya” dan “kami” yang menjadi pembeda antara permintaan maaf untuk personal serta mewakili instansi secara keseluruhan.

Permintaan maaf yang digunakan oleh para anggota DPR RI juga menarik untuk disorot karena permintaan maaf tidak hanya ditujukan untuk perbaikan citra personal, tetapi diiringi dengan adanya pertanggungjawaban untuk memperbaiki citra instansi. Peristiwa krisis kepercayaan publik terhadap DPR RI pada Agustus–September 2025 bukan peristiwa kecil. Puan Maharani sebagai ketua umum DPR RI memberikan permintaan maaf atas demonstrasi besar yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat sipil atas krisis kepercayaan tersebut. Puan Maharani dalam video permintaan maafnya mengatakan, “Kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat.” Kata “kami” di dalam video permintaan maaf tersebut menjadi pertanda bahwa Puan Maharani tidak hanya menyampaikan maaf sebagai anggota DPR RI secara personal, melainkan juga mewakili seluruh anggota DPR atas kesalahan yang dilakukan secara kolektif. Tekanan untuk meminta maaf tidak hanya berasal dari masyarakat sipil sebagai mitra tutur, tetapi disertai adanya sanksi dari instansi sebagai wakil rakyat.

Strategi permintaan maaf yang ditemukan di antaranya adalah penjelasan mengenai situasi (*expression of apology*) yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni terkait pelanggaran yang ia lakukan hingga menimbulkan amarah bagi rakyat sipil.

- 1) “Dia sempat keluar negeri, memang ke Singapura, tapi urusan kerjaan, kata dia.” (03/AS/TL/EXPL/1:21-1:25)
- 2) “Ada yang terjadi sama keluarganya beliau, dan dia bilang, demi keselamatan keluarganya waktu itu terpaksa dia diem.” (04/AS/TL/EXPL/1:38-1:46)

Pada akhir bulan Agustus 2025, Ahmad Sahroni melontarkan kalimat, “Orang tolol sedunia!” sebagai respon untuk rakyat sipil yang menyuarakan untuk membubarkan DPR akibat kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak

masuk akal. Hal ini memicu kemarahan rakyat sipil, tetapi di tengah kekacauan tersebut Ahmad Sahroni ditemui di Bandara Internasional Changi, Singapura yang semakin memercik kemarahan rakyat dan menuntut Ahmad Sahroni untuk segera meminta maaf. Melalui Ferry Irwandi lewat panggilan seluler, Ahmad Sahroni menjelaskan bahwa ia ke Singapura untuk urusan pekerjaan, bukan untuk rekreasi keluarga seperti narasi yang beredar luas di sosial media. Fenomena penjelasan mengenai situasi ini ditandai dengan “...memang ke Singapura, tapi urusan kerjaan, kata dia.”

Usai kasus pengucapan kata tolol yang dilontarkan dan terbangnya Ahmad Sahroni menuju Singapura di tengah-tengah demonstrasi besar oleh mahasiswa dan rakyat sipil atas kebijakan kontroversial DPR RI. Ahmad Sahroni kembali memicu amarah masyarakat karena sekembalinya ia dan keluarga di Indonesia, tidak ada klarifikasi atau kata maaf yang dikeluarkan oleh Ahmad Sahroni terkait kontroversi yang dilakukannya. Ahmad Sahroni berusaha menjelaskan melalui Ferry Irwandi bahwa alasannya tetap bungkam ditandai dengan “...demi keselamatan keluarganya waktu itu terpaksa dia diem.”

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi permintaan maaf yang digunakan oleh anggota DPR RI dalam video klarifikasi dan permintaan maaf mereka di media sosial, dengan menelaah bentuk-bentuk tindak tutur ekspresif permintaan maaf yang muncul.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk strategi permintaan maaf yang digunakan oleh para anggota DPR RI dalam video klarifikasi dan permintaan maaf mereka serta strategi permintaan maaf apa

yang paling dominan digunakan oleh para anggota DPR RI dalam video klarifikasi dan permintaan maaf mereka?

1.3. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang sudah dibuat di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk strategi permintaan maaf yang digunakan oleh anggota DPR RI dalam video klarifikasi dan permintaan maaf mereka serta mengidentifikasi strategi permintaan maaf yang paling dominan digunakan oleh anggota DPR RI dalam video klarifikasi dan permintaan maaf mereka.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kajian tindak tutur ekspresif permintaan maaf, sehingga jenis-jenis tindak tutur lain yang mungkin muncul dalam video klarifikasi dan permintaan maaf tidak menjadi fokus analisis. Analisis strategi permintaan maaf dibatasi menggunakan lima kategori strategi permintaan maaf Cohen dan Olshtain, tanpa teori pemulihan citra dari ilmu komunikasi. Data penelitian dibatasi pada tuturan verbal yang terdapat di dalam video klarifikasi dan permintaan maaf sehingga aspek nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi, gestur tubuh, dan elemen visual lainnya tidak dianalisis. Subjek penelitian dibatasi pada anggota DPR RI yang secara resmi dinonaktifkan dari fraksi partainya masing-masing, ketua dan wakil ketua DPR RI, serta ketua komisi II DPR RI pada periode demonstrasi yang dilaksanakan pada Agustus-September 2025.

Penelitian ini juga mempertimbangkan data berupa tuturan permintaan maaf yang disampaikan secara tidak langsung (*reported speech*) melalui pihak ketiga, tuturan tersebut secara langsung dinyatakan sebagai representasi pernyataan

anggota DPR yang bersangkutan. Penelitian ini juga dibatasi pada analisis bentuk kebahasaan strategi permintaan maaf itu sendiri, tanpa mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas atau keberhasilan permintaan maaf tersebut dalam memengaruhi opini publik maupun keputusan sanksi kelembagaan yang dijatuhkan.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pragmatik, khususnya dalam tindak tutur ekspresif permintaan maaf pada publik figur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang linguistik, terutama di bidang tindak tutur ilokusi ekspresif meminta maaf.

1.5.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat menjadi referensi tambahan dalam mempelajari dan menganalisis strategi permintaan maaf, khususnya pada data wacana politik yang bersifat autentik dan aktual. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola strategi permintaan maaf yang selama ini digunakan dalam video klarifikasi dan permintaan maaf, sehingga dapat menjadi bahan refleksi dalam menyusun tuturan permintaan maaf yang lebih efektif dan sesuai dengan konteks pelanggaran yang dihadapi.

1.6. Keaslian Penelitian (*State of The Art*)

Kajian tentang strategi permintaan maaf figur publik di media sosial telah cukup banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus menyoroti video klarifikasi dan permintaan maaf anggota DPR RI masih sangat terbatas. Sebagian besar

penelitian terdahulu mengenai strategi permintaan maaf berfokus pada figur publik dari kalangan hiburan, seperti aktor, penyanyi, dan konten kreator seperti yang dilakukan oleh Chintawidy (2023), mengambil beberapa artis yang mulai berkecimpung di dunia politik, lalu Diliana (2025) mengambil seorang mantan penyanyi cilik berinisial AM, sedangkan kajian terhadap tindak tutur politisi di media sosial lebih banyak menyoroti jenis tindak tutur asertif atau provokatif dibandingkan tindak tutur ekspresif permintaan maaf seperti yang dilaksanakan oleh Harsa dan Arifulhak (2022), serta Praditomo dan Utomo (2022). Tindak tutur permintaan maaf lainnya pernah diteliti oleh Piantari (2024), tetapi fokus dari penelitian ini bukan kepada strategi permintaan maaf Cohen dan Olshtain, melainkan teori praanggapan. Sawitri (2026) juga melakukan penelitian mengenai tindak tutur ilokusi figur publik di media sosial, tetapi tindak tutur yang digunakan adalah tindak tutur ilokusi asertif berupa pembelaan diri, bukan permintaan maaf.

Anggota DPR memiliki karakteristik kontekstual yang khas dan berbeda dari figur publik pada umumnya, yaitu status sebagai pejabat negara dengan kekuatan sosial tinggi, tetapi berada dalam posisi terdesak akibat sanksi kelembagaan dari partai politiknya sendiri sehingga strategi permintaan maaf yang mereka pilih berpotensi berbeda, baik dari segi bentuk kebahasaan yang digunakan, tingkat keeksplisitan pengakuan kesalahan, penggunaan strategi pengalihan tanggung jawab kepada pihak lain seperti media atau pihak yang dianggap memotong pernyataan mereka, maupun kombinasi strategi permintaan maaf menurut model Cohen dan Olshtain yang mereka pilih dalam menghadapi tekanan publik tersebut. Kesenjangan penelitian inilah yang mendasari urgensi kajian lebih lanjut mengenai fenomena tersebut, khususnya dengan memusatkan perhatian pada

momentum krisis politik nasional yang melibatkan banyak aktor politik secara bersamaan.

